



# **BAB 10**

## **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**



# PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB

10

## 10.1. Program Transisi

**P**roses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 memiliki titik sambung dengan program-program pembangunan pemerintah sebelumnya. Demikian pula halnya, RPJMD ini akan memiliki kesinambungan dengan RPJMD periode selanjutnya. Karena itu, di akhir RPJMD ini juga membuka ruang adanya periode transisi untuk berjalannya program-program pembangunan sebelumnya.

Ruang transisi semacam dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Melalui adanya RPJMD Transisi, dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD Transisi akan berfungsi menjadi dokumen dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru pada tahun transisi, juga sebagai acuan bagi seluruh pemangku pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan bersama. RPJMD Transisi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun transisi.

## 10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 ini dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru. Untuk melaksanakan

rencana tersebut maka perlu dijabarkan dalam rencana tahunan dalam rangka menajamkan dan menjadi pedoman pada masing-masing program dan kegiatan didalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan serta dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru,
2. Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021,
3. Untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
  - b. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta pokok-pokok pikiran DPRD.

- c. Rancangan Akhir RKPD difinalkan setelah dilaksanakan musrenbang Kabupaten, materi yang dibahas dalam musrenbang kabupaten merupakan hasil dari forum Perangkat Daerah dengan peserta diskusi terdiri dari seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
4. Dalam rangka penyebarluasan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru, RPJMD Kabupaten kotabaru tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang secara terus menerus diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
5. Untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru berpedoman pada RPJMD, dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.

### **10.3. Skenario Indikator Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021**

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka menengah daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah.

### **10.3.1. Skenario Pembangunan Ekonomi.**

Pengembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai sektor utama yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

Berbagai hal yang diperlukan untuk perubahan struktur ekonomi antara lain adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) secara memadai terutama transportasi laut, darat dan udara; serta penyediaan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

#### **a. Pengembangan Sektor Utama**

Pengembangan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Kotabaru diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor-sektor utama yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan sektor utama juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan

pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha

#### **b. Pengembangan Kehutanan dan Pengelolaan Pertambangan**

Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor utama dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Pengelolaan pertambangan yang sudah ada mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan, pembatasan kawasan penambangan secara bertahap, pengolahan sisa tambang dan reklamasi area bekas penambangan agar memiliki nilai guna dalam jangka panjang.

#### **c. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.**

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*), keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

#### **d. Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik.**

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi mengarah pada perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, laut dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kotabaru.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif terutama di daerah yang belum terjangkau oleh PT PLN, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan perluasan dan perbaikan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor utama, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotabaru serta pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

#### **e. Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah.**

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor utama, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif. Disamping itu, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) dan penataan manajemen Perangkat Daerah yang menarik Pajak dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru juga perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan berupaya untuk menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Kotabaru. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi

daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

#### **f. Penjaminan Kepastian Hukum.**

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Dengan melakukan berbagai upaya yang telah diuraikan diatas, diharapkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kotabaru semakin baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan Iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin besarnya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan. Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan sistem



inovasi daerah (SIDa) semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya kelembagaan dan inovasi produk unggulan sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar.

Perkebunan di Kabupaten Kotabaru semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Sentra perkebunan akan dikembangkan, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat dengan kegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam hal ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan. Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kotabaru juga ditopang oleh perkembangan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan

seperti pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang dapat diandalkan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Diperkirakan laju investasi di Kabupaten Kotabaru semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Industri berbasis sistem inovasi daerah dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, serta promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Jika hal ini telah tercapai maka neraca perdagangan kabupaten Kotabaru akan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk. Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian. Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga sudah mulai memantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah.

### **10.3.2. Skenario Pembangunan Wilayah**

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar wilayah; pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan serta pulau-pulau kecil.

Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (1) jangkauan transportasi utama termasuk transportasi darat, sungai dan penyeberangan yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas; (2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana; (3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai; (4) keunggulan komparatif setiap daerah; (5) memperhatikan alih fungsi lahan dan daerah resapan air dan (6) keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.